

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT**

**TESIS**

**Oleh**

**CICI INDAH SARI**

**NPM.221801014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repositorv.uma.ac.id) 30/12/24

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**CICI INDAH SARI**

**NPM.221801014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id) 30/12/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) di Kelurahan  
Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

**Nama** : Cici Indah Sari

**Npm** : 221801014

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**



**Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 12 Juni 2024**

---

---

**Nama : Cici Indah Sari**

**NPM : 221801014**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA**

**Sekretaris : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repositorv.uma.ac.id)30/12/24

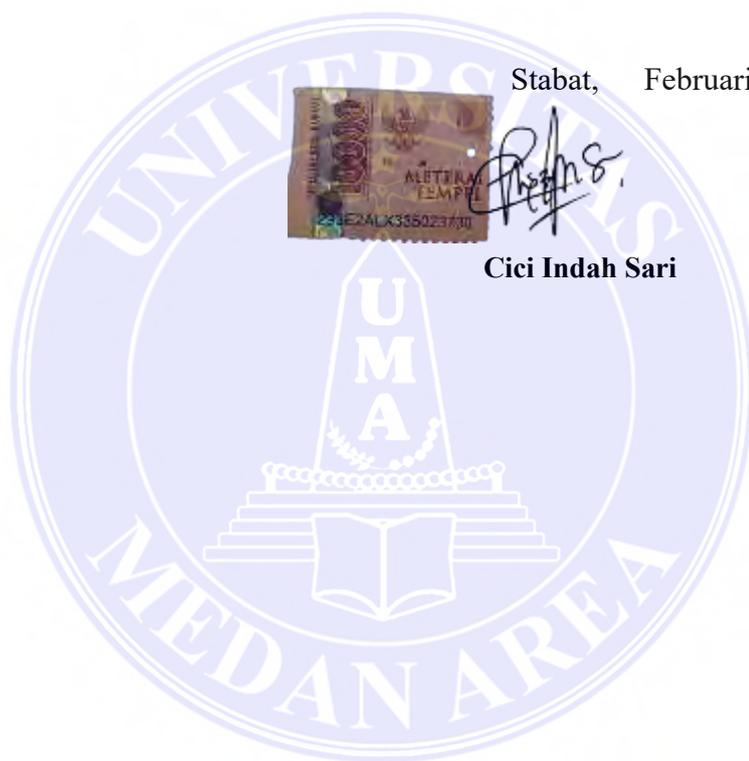
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Stabat, Februari 2024



**Cici Indah Sari**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Indah Sari  
NPM : 221801014  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

Yang menyatakan



**Cici Indah Sari**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan seluruh rahmat dan karunia serta ridho- Nya, yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Sholawat dan salam saya sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan umat dari zaman jahiliyah ke zaman peradapan yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan dan nikmati sampai saat ini, semoga kita mendapatkan safaat nya di akhirat kelak. Aamiinn.

Proposal tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penelitian tesis pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area dan saya berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian proposal ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan salam hormat saya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Penulis yaitu Almarhum Ayahanda Syaiful Tahar dan Ibu Hj.Nurlela yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan dukungan serta iringan do'a kepada saya.
2. Suami tercinta M.Ali Husni Mubarak Lubis, SH yang selalu memberikan semangat dan Motivasi serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Kuswardani, MS, Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, Selaku Ketua Prodi Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Budi Hartono, M. Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar dan bijaksana memberikan nasehat dalam membimbing saya.
7. Bapak Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP, sebagai Pembimbing II yang telah sangat banyak memotivasi dan membantu dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, semoga segala bantuan yang diberikan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin.
9. Keluarga Besar Dinas Sosial yang sudah membantu saya memberikan data dan khususnya buat sahabat-sahabat saya kak Andika sekar sari, kak Elida Fitri Khairuna Lbs, serta Abangnda saya Ahmad Senang yang selalu support dan memberikan semangat untuk penyelesaian tesis ini.
10. Keluarga Besar BAMAI (Biro Administrasi Mutu Akademik dan Informasi) Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah

memberikan bantuan, semangat serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.

11. Teman-teman seperjuangan perkuliahan yang sama-sama dari daerah Kab.Langkat yaitu Bapak Suriadi, Dedy Irawadi, Lely Afrida dan Alfrida Rosalina Sirait yang selalu kompak Bersama untuk menuntut ilmu meraih gelar magister Administrasi Publik, semoga ilmu yang di dapat bermanfaat untuk masa depan kita.

Peneliti menyadari bahwa dalam proposal ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga proposal ini dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan.

Medan, Februari 2024

Penulis



Cici Indah Sari

## HALAMAN MOTTO

***“BEKERJA KERAS DALAM DIAM, DAN BIARKAN SUKSES MENJADI  
KEBISINGANMU.”***



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

**Nama** : Cici Indah Sari  
**NPM** : 221801014  
**ProgramiStudi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**PembimbingI** : Dr. Budi Hartono, M.Si  
**PembimbingII** : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP

Implementasi merupakan langkah kongkrit dalam mewujudkan berbagai kebijakan serta regulasi yang telah tersusun dengan baik. Program keluarga harapan merupakan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan UU tentang pengentasan fakir miskin. Dalam permensos no. 1 tahun 2018 disebutkan bahwa program PKH disusun dengan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Implementasi terkait program keluarga harapan di kelurahan sidomulyo kecamatan Staba menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan kunci, utama dan tambahan. Adapun yang menjadi objek penelitian nya adalah Keluarga Penerima Manfaat PKH kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat kabupaten Langkat.

**Kata kunci** : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH)

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN SIDOMULYO VILLAGE, STABAT DISTRICT LANGKAT DISTRICT**

**Name** : Cici Indah Sari  
**Student Number** : 221801014  
**Major** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**1<sup>st</sup> Advisor** : Dr. Budi Hartono, M.Si  
**2<sup>nd</sup> Advisor** : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

*Implementation is a concrete step in realizing various policies and regulations that have been well structured. The Family Hope Program is the government's effort to alleviate poverty in accordance with the Law on poverty alleviation. In social minister no. 1 of 2018 states that the PKH program was prepared with the aim of reducing poverty rates and breaking the chain of poverty, improving the quality of human resources, and changing the behavior of KPMs which are relatively less supportive of increasing welfare. Implementation of the family hope program in Sidomulyo sub-district, Staba sub-district is the focus of research in this paper. This research aims to analyze how the Family Hope Program (PKH) is implemented in Sidomulyo subdistrict, Stabat subdistrict and to analyze the factors that influence the Family Hope Program (PKH) in Sidomulyo subdistrict, Stabat subdistrict, Langkat district. This research uses a descriptive method with a qualitative approach using interview techniques with key, main and additional informants. The research object is the PKH beneficiary family, Sidomulyo sub-district, Stabat sub-district, Langkat district.*

**Keywords:** Implementation, Family Hope Program (PKH)

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>7</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>10</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
1.2.Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
1.3.Tujuan Penelitian .....	<b>7</b>
1.4.Manfaat penelitian.....	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Konsep Implementasi .....	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli .....	<b>9</b>
2.1.2 Model implementasi .....	<b>15</b>
2.1.3 Faktor-faktor Implementasi.....	<b>23</b>
2.2. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	<b>29</b>
2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) .....	<b>29</b>
2.2.2. Dasar Hukum Secara Teknis .....	<b>29</b>
2.2.3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	<b>30</b>
2.2.4. Sasaran Penerima Bantuan PKH .....	<b>31</b>
2.2.5. Kewajiban Peserta PKH.....	<b>32</b>
2.2.6. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	<b>33</b>
2.2.7. Kelembagaan PKH.....	<b>35</b>
2.2.8. Kegiatan PKH .....	<b>36</b>
2.3. Dasar Konseptual.....	<b>36</b>
2.4 Penelitian Terdahulu .....	<b>39</b>
2.5 Kerangka Pikir Penelitian .....	<b>44</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>

3.1 Tempat dan waktu Penelitian .....	47
3.2 Subyek Penelitian.....	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4 Analisis Data.....	53
3.5 Prosedur Penelitian .....	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
4.1.1 Kelurahan Sidomulyo.....	59
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	60
4.1.3 Struktur Organisasi .....	61
4.1.4 Visi dan misi kelurahan sidomulyo.....	66
4.2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .....	68
4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .....	78
BAB V PENUTUP .....	91
5.1. KESIMPULAN .....	91
5.1.1. Impelementasi Program Kelurga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.....	91
5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupten Langkat.....	91
5.2. SARAN .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Prov. Sumatera Utara

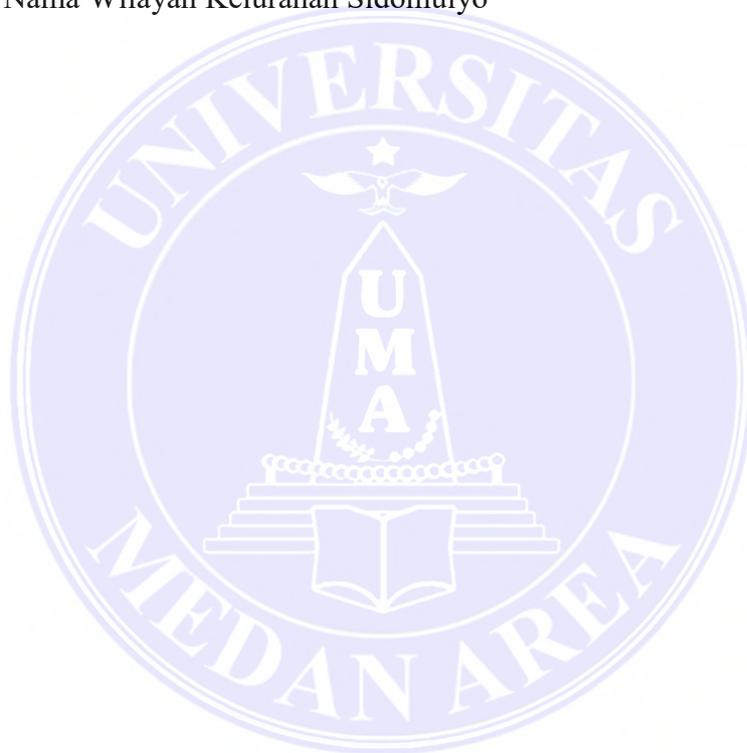
Tabel 2. Jumlah KPM PKH

Tabel 3. Skema Bantuan PKH 2020-2023

Tabel 4. Penelitian Terlebih Dahulu

Tabel 5. Pedoman Penulisan Tesis

Tabel 6. Nama Wilayah Kelurahan Sidomulyo



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi George C Edward III

Gambar 2. Kerangka Berpikir

Gambar 3. Analisis Data Model Interaksi

Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan Sidomulyo



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dalam negara terbelakang dan berkembang masih menjadi titik fokus dalam penanganan dan pemberantasannya. Berbagai kebijakan regulasi dirumuskan dengan tujuan melindungi serta menjaga hak-hak berkehidupan bagi mereka, termasuk negara Indonesia. Sebagai salah satu dari bagian negara yang sedang berkembang, kemiskinan menjadi perhatian yang serius. Sepanjang perpindahan rezim dan tampak kepemimpinan kepala negara, Kemiskinan kerap menjadi isu utama dalam kebijakan yang dirumuskan di negara ini.

Kemiskinan multi dimensi merupakan masalah klasik namun menjadi serius dan kerap ada di Tengah Masyarakat. Di Indonesia, kemiskinan seharusnya menjadi masalah yang perlu diberikan kesempatan yang serius dalam merumuskan bagaimana proses penanganannya. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan menjadi faktor terbesar bagi masyarakat banyak mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS bahwasanya kemiskinan dianggap kian menurun dari tahun ke tahun. Berikut tabel jumlah Penduduk Miskin hingga level Kabupaten/ Kota di seluruh Sumatera Utara.



rakyat dan pengentasan kemiskinan serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan berintegrasi pada bantuan yang lain untuk mendorong akumulasi asset/Tabungan dan akses layanan sosial yang lain.

Salah satu program unggulan yang dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk program perlindungan perlindungan sosial yang menangani masalah penganggulan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan Masyarakat. Adapun yang menjadi dasar hukum terhadap pelaksanaan program ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, PERPRES No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Salah satu bentuk program bantuan untuk penanganan kemiskinan adalah *Conditional Cash Transer (CCT)* dan PKH merupakan salah satu bentuk program tersebut. Hal tersebut akrab di dunia dan juga dikenal sebagai penanggulangan kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Sasaran program ini adalah memberikan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Hal tersebut dianggap sebagai salah satu Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Sejak tahun 2007 Program Bantuan Tunai Bertahap (BTB) dianggap pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sehingga lebih kenal disebut PKH. Tujuan PKH adalah memperkecil jumlah kemiskinan dan ikut serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebahagian besar terdiri dari Masyarakat sangat miskin. Saat ini, komponen PKH atau

anggota Keluarga penerima manfaat yang menjadi titik sasaran penerimaan bantuan tersebut, difokuskan pada aspek Kesehatan dan Pendidikan. Kedua hal ini dianggap perlu dengan alasan bahwa, kedua hal ini menjadi inti dari peningkatan kualitas hidup Masyarakat Indonesia khususnya. (Buku Kerja Pendamping PKH, 2008). Melalui program ini setidaknya dapat mengurangi beban rumah tangga sangat miskin yang menjadi penerima PKH dalam menggunakan layanan tersebut. (bidang Pendidikan dan Kesehatan).

Dengan hadirnya program PKH, Masyarakat Kabupaten Langkat diharapkan mampu merasakan pengurangan beban rumah tangga sangat miskin, Ketika menjadi peserta dalam program PKH tersebut. Tentunya kemudahan dalam mengakses layanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan tersebut.

Terdapat beberapa hambatan dan halangan dalam program PKH walaupun program ini telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di beberapa tahun belakangan ini. Data yang tidak valid mengenai kelayakan peserta PKH, serta dinamika Masyarakat yang kerap terjadi terkait kelayakan peserta PKH tersebut. salah satu yang kerap menjadi persoalan adalah pengaduan Masyarakat terkait peserta yang seharusnya bukan merupakan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Di satu sisi, terdapat beberapa orang dari Masyarakat yang dinilai layak untuk dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin namun tidak terdata dan tidak mendapatkan program PKH. Hal ini didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh beberapa perwakilan warga dan dikonfirmasi oleh petugas PKH.

Kemudian, berdasarkan laporan yang diterima dari petugas PKH mengenai nominal bantuan yang diterima oleh KPM PKH belum maksimal digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam program PKH tersebut. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan anak-anak komponen Pendidikan yang belum mampu membeli seragam sekolah dan membayar uang iuran untuk kebutuhan Pendidikan di luar sekolah, padahal estimasi jumlah nominal bantuan yang diterima dan rasio pengeluaran setiap jenjang Fasilitas Pendidikan mencukupi dan sesuai.

Bahkan dalam kasus yang paling ekstrim, KPM PKH yang mendapatkan program tersebut menggunakan bantuannya pada hal-hal yang bersifat konsumtif di luar dari apa yang diharapkan program PKH itu sendiri. Idealnya, program PKH ini dilakukan secara professional sehingga jumlah Rumah Tangga miskin di daerah tersebut dapat memungkinkan akan menurun sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah. Jika program ini berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya secara undang-undang dan ketentuan yang berlaku, kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia dapat tertangani secepat mungkin.

Kebijakan yang dirumuskan baik dalam bentuk Keputusan, peraturan dan perundang-undangan kerap membutuhkan Tindakan nyata untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Implementasi dari Keputusan yang telah dirumuskan tersebut merupakan kata kunci dari keberhasilan kebijakan tersebut. jika implementasi sebuah kebijakan menemukan hambatan dari luar maupun di dalam Lembaga tersebut akan berdampak terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan tentunya berpengaruh terhadap orang,

Lembaga atau Masyarakat sebagai objek dari implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tersebut.

Berikut data Keluarga Penerima Keluarga Manfaat yang ada di Kelurahan Sidomulyo :

Tabel 2 : Jumlah KPM PKH

<b>NO</b>	<b>Lingkungan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kel.Sidomulyo yg terdata dalam DTKS</b>	<b>Jumlah KPM</b>	<b>TOTAL YG DITERIMA</b>
1	Lingkungan 1	335 jiwa	53	Rp. 7.274.999,-
2	Lingkungan 2	576 jiwa	55	Rp. 7.324.999,-
3	Lingkungan 3	428 jiwa	42	Rp. 5.425.000,-
4	Lingkungan 4	289 jiwa	52	Rp. 8.350.000,-
5	Lingkungan 5	387 jiwa	126	Rp. 19.791.666,-
6	Lingkungan 6	378 jiwa	19	Rp. 2.033.333,-
7	Lingkungan 7	326 jiwa	16	Rp. 2.783.333,-

Sumber : Kelurahan Sidomulyo

Di lihat dari tabel di atas terdapat jumlah penduduk Kel.Sidomulyo yang terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) setiap lingkungan dan jumlah Penduduk Kel.Sidomulyo yang mendapatkan bantuan PKH serta jumlah yang diterima KPM PKH, dalam hal ini jika dilihat dari jumlah Penduduk Kelurahan Sidomulyo yang terdata di DTKS, jumlah penerima bantuan PKH lebih sedikit dibandingkan besaran jumlah keluarga Prasejahtera yang di paparkan dalam DTKS tersebut, maka dari pada itu Implementasi sangat diperlukan sebagai

acuan untuk mengukur keberhasilan suatu program yang berupa peraturan, kebijakan dalam berbagai bentuk seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dari analisis permasalahan serta latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini, titik fokus pembahasannya adalah penerapan Program Keluarga Harapan di kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Program Keluarga Harapan ini memiliki tujuan utamanya dengan membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdapat pada kelompok Masyarakat sangat miskin. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk Menganalisis bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

2. Untuk Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

#### 1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait khususnya di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan pada umumnya dan aspek ilmu Administrasi publik pada khususnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Implementasi

##### 2.1.1 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Implementasi merupakan Tindakan yang perlu dilakukan atas hasil dari perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Tanpa implementasi, apa yang telah dirumuskan akan menjadi wacana yang tidak terealisasi dalam penerapan secara nyata. Implementasi juga merupakan Tindakan dalam mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan, dan dirumuskan. Sehingga implementasi juga dapat disebut sebagai perwujudan Tindakan dalam perencanaan yang telah dipersiapkan. Implementasi juga akan baik dilaksanakan jika semua unsur yang terkait di dalamnya saling mendukung satu sama lain.

Akan dilihat kemudian bagaimana implementasi memainkan perannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik jika saja semua unsur internal maupun eksternal dari pelaksana implementasi (subjek) terpenuhi. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya juga akan dapat dilihat menjadi pemicu keberhasilan implementasi suatu perencanaan ataupun kebijakan.

Mengutip Wahab dalam kamus Webster (2012), Implementasi adalah “kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Berarti mengimplementasikan, dalam kamus tersebut memiliki pengertian *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ; dan *to give practical effect to* (memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu. (Webster dalam Wahab, 2012).

Dari pengertian menurut etimologi di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa Implementasi yang bersumber dari Bahasa Inggris yang memiliki pengertian sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dimaksud itu baik merupakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintahan dalam system kehidupan bernegara.

Secara komplit, akan dikemukakan beberapa pengertian implementasi dikumpulkan oleh beberapa orang para ahli berikut ini: Usman merumuskan bahwa muara implementasi adalah berada pada aktifitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Ia juga bukan sekedar aktifitas, namun berupa kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan, (Usman, 2002:70). Setiawan juga memberikan pengertian bahwa Implementasi dapat juga dikatakan sebagai perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan antara proses interaksi tujuan dan Tindakan. Untuk mencapainya memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Setiawan, 2004:39). Harsono dalam bukunya menyebutkan implementasi adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan menjadi Tindakan dari politik ke dalam administrasi. Atau pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program. (Harsono, 2002: 67). Sementara menurut Pressman dan Wildavsky (1973) implementasi menurutnya *“accomplishing, fulfilling, carrying out, producing and completing a policy”*. Ini mengartikan bahwa implementasi adalah mencapai, memenuhi atau melaksanakan dan menyelesaikan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Tornanatzky dan Johson juga mengemukakan pengertian implementasi dan membatasi pengertian tersebut bahwa, implementasi sebagai “...*the translation of any tool technique process or method of doing from knowledge to practice*” (Subandijah, 1996: 305). Ini mengartikan bahwa implementasi adalah penerjemahan dalam setiap proses perencanaan tersebut, dapat juga dikatakan sebagai Teknik atau metode dalam melakukan konsep yang berupa pengetahuan beralih kepada praktik atau Tindakan yang nyata.

Mazmanian dan Sabatier juga memberikan defenisi tentang implementasi adalah sebagai dasar hukum yang berbentuk perintah, Keputusan, ataupun putusan pengadilan. Proses ini berlangsung Ketika tahapan-tahapan dalam setiap pengesaaan undang-undang, peraturan ataupun jenis lainnya selesai. Output dalam bentuk pelaksanaan Keputusan kebijakan hingga sampai kepada kebijakan korektif yang bersangkutan. Dengan kata lain, implementasi menurut mereka adalah berfokus kepada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan dari berbagai bentuk yang telah disepakati.

Wahab juga mengatakan bahawa Implementasi juga terkait degan Tindakan yang dilakukan baik individu ataupun para pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang memiliki arah kepada ketercapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan kebijakan (1997:63).

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi juga terkait dengan pelaksanaan Tindakan baik itu individu, pejabat, instansi pemerintah swasta yang memiliki tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan tertentu. Badan ataupun kelompok-kelompok yang dimaksud yang memiliki dampak pada warga.

Dalam praktiknya, pekerjaan dibawah mandat UU yang berdampak kepada ketidakjelasan mengenai pelaksanaan putusan yang harus dilakukan dan yang boleh dilakukan. Hal ini menimbulkan keniscayaan terhadap implementasi yang akan dilakukan berdampak berhasil ataupun gagal. Tachjan juga menyebutkan, implementasi kebijakan public merupakan salah satu proses adminitrasi yang dilaksanakan Ketika sebuah kebijakan telah ditetapkan atau disetujui. Perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan memiliki kandungan yang logika yang bersifat top-down yang memiliki makna implementasi kebijakan yang bersifat alternatif abstrak (2006:25).

Sumaryadi (2011) mengemukakan unsur-unsur penting dalam sebuah proses implementasi yaitu: (1) program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan tersedia (2) kelompok Masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Dalam konteks aksiologis, Implementasi diharapkan sebagai Langkah kongkrit dalam mewujudkan berbagai kebijakan serta regulasi yang telah disusun dengan baik dan penuh rencana.

Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, antara lain:

- Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

- Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, implementasi adalah Tindakan yang perlu dilakukan agar kebijakan, peraturan dan ketetapan yang telah disusun dalam berbagai program dapat diukur dengan baik sesuai target yang akan dicapai.

Apabila Pengertian implementasi dikaitkan dengan kebijakan, maka kebijakan tersebut hanya dirumuskan kemudian dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat disebabkan terdapat masalah-masalah yang tidak dapat ditemukan dalam konsep, teori dan perumusan namun kemudian muncul di lapangan. Konsistensi terhadap implementasi juga merupakan hambatan utama dalam implementasi tersebut.

Bedasarkan penjelasan-penjelasan mengenai definisi implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Implementasi merupakan kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam konseptualisasi, implementasi kebijakan sebagaimana disebutkan Purwanto dan Sulistyastuti (2015) para ahli administrasi Publik prihatin melihat

kegagalannya dalam memberikan fungsi dan perannya. Mereka kemudian berinisiatif untuk lebih memahami bagaimana sesungguhnya proses implementasi kebijakan /program berjalan dan berlanjut.

Pemahaman secara mendetail dan dalam terhadap proses Implementasi kebijakan tersebut akan menghasilkan beberapa rekomendasi dan tawaran solusi. Rekomendasi ini sangat berguna sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang lebih baik kembali.

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis implementasi, antara lain :

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujuan melalui proses politik.

2. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

3. Implementasi Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program

## 5. Implementasi Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

Deskripsi di atas menjelaskan tentang jenis-jenis implementasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik serta kriteria kebijakan yang telah dirumuskan dalam sebuah regulasi, perundang-undangan serta ketetapan-ketetapan yang lainnya.

Pada pembahasan berikutnya akan dilihat bagaimana model implementasi yang mendukung berbagai kebijakan, ketetapan serta kesepakatan yang telah dirumuskan Bersama oleh perseorangan, Lembaga atau pada instansi-instansi terkait.

### 2.1.2 Model implementasi

Implementasi juga memiliki model yang dirumuskan oleh para ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidangnya masing-masing. Dalam kajian ini, penulis merangkum beberapa pendapat ahli sebagai bahan untuk menganalisis model pendekatan yang akan digunakan nantinya pada penelitian ini. Pada model yang paling klasik, seperti yang pernah diperkenalkan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model ini, memiliki beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Adapun variabel tersebut antara lain:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Keempat point di atas merupakan variabel yang memiliki pengaruh dalam model ini. Model berikutnya ditawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983). Menurut mereka, Implementasi merupakan pelaksanaan terhadap sebuah Keputusan kebijakan. Dalam model ini dikenal dengan istilah *a framework for implementation analysis*. Sebuah kerangka kerja dalam analisis implementasi. Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen

Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan

teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

### 3. Variabel Dependenden

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Ketiga variabel ini pada hakikatnya terdapat dalam proses implementasi menurut pendapat mereka. Model berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Hogwood dan Gunn (1978), teori ini juga sering disebut sebagai teori kebijaksanaan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendala waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi

masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasi. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan control.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organisasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistem administrasinya. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.

Agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik, syarat di atas harus dapat dilaksanakan dengan efektif. Pada point 1, kondisi politis dan beberapa kendala yang berada di luar control pembuat wewenang merupakan sebuah hambatan. Tak jarang implementasi terbentur dengan kepentingan-kepentingan

politis tertentu. Point ke 2, kondisi waktu dan target serta harapan juga dapat menjadi penentu dalam proses pelaksanaan implementasi tercapai dengan baik.

Sedangkan di point ke 3, keterpaduan sumber-sumber yang ada dalam mendukung implemntasi diperlukan dalam mendukung ketercapaian implementasi tersebut. Apabila salah sumber yang ada tidak terpenuhi, maka proses implementasi tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sumber-sumber itu dapat juga berupa waktu, fisik berbagai kepentingan politis seperti yang dijabarkan pada point sebelumnya.

Point-point selanjutnya merupakan prasyarat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Berikutnya model yang ditawarkan oleh Goggin, Ann Bowman, dan James Lester dengan apa yang disebutnya sebagai *communication model*” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan” (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya model Implementasi diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (1980). ia menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making).
5. Para pelaksana program (program implementators).
6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources committed).

Model selanjutnya adalah apa yang disebutkan George Edward ( 2011 ) dalam ( Widodo ( 2011:96–110 ) dengan melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor–faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor–faktor tersebut terhadap implementasi.

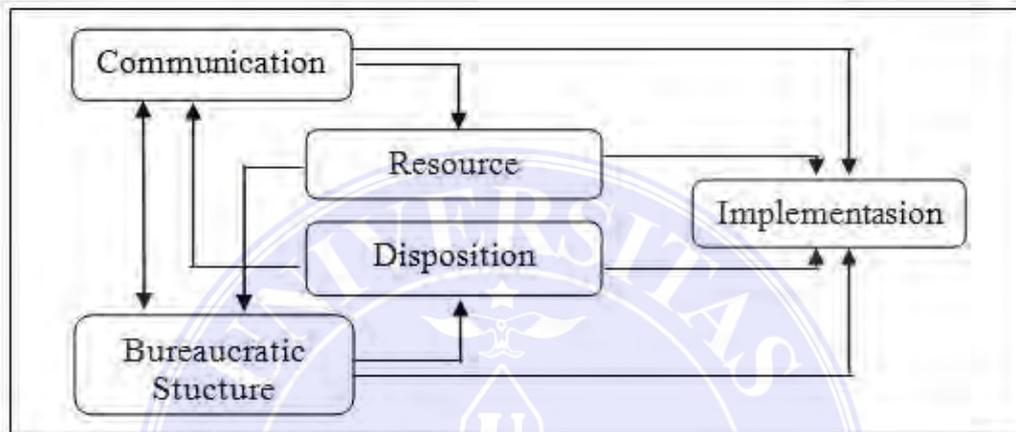
Dalam penelitian ini model Implementasi yang dirumuskan Edwrad dipilih sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dalam model ini, Edward akan mengemukakan beberapa point pertanyaan yang dapat memberikan jawaban yang berimplikasi kepada faktor-faktor terjadinya implementasi yang baik.

### **2.1.3 Faktor-faktor Implementasi**

Dalam hal ini, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor– faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 1. Model Implementasi George C. Edward III

Skema pada gambar di atas menjelaskan bagaimana alur kerja dan titik singgung yang saling berkaitan antara satu sama lain akan factor-faktor implementasi yang saling berkaitan. Secara gambling faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Komunikasi ( Communication ) yang merupakan proses penyampaian sebuah informasi dari seorang komunikator kepada komunikan (pendengar, objek informasi). Komunikasi kebijakan memiliki pengertian bahwa ia merupakan sebuah proses penyampaian informasi kebijakan yang bersumber dari pembuat kebijakan (*Policy Makers*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*). Widodo menambahkan, penyampaian informasi melalui pelaku kebijakan dianggap perlu bertujuan

agar pelaksana kebijakan dapat memahami secara komprehensif tentang isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (Target grup) kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, pelaku kebijakan dapat melakukan sebuah persiapan terhadap hal-hal yang memiliki hubungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal itu bertujuan agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi kebijakan dalam konteks implementasi mencakup dimensi transformasi (*transmisi*). Informasi yang akurat dan jelas (*Clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi dapat dengan mudah dipahami, serta menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Interpretasi kelompok sasaran dan pihak yang terkait juga merupakan hal yang harus dihindari oleh komunikasi pada pembahasan ini. Dimensi konsistensi juga bertujuan agar informasi yang disampaikan harus konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait di dalamnya.

2. Sumber Daya ( Resources ); faktor ini memiliki kaitan yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Artinya bahwa jelas dan konsistennya sebuah ketentuan dan aturan, serta bagaimana akurasi ketentuan dan aturan tersebut jika tidak mempunyai sumber daya yang baik dalam melaksanakan ketentuan tersebut akan menjadi tidak efektif dan efisien sebuah implementasi. sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dimaksimalkan dalam mendukung sebuah keberhasilan implementasi. sumber daya ini meliputi:

a. Sumber daya manusia (Staff)

Ukuran dari keberhasilan sumber daya manusia adalah dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Kualitas Sumber daya Manusia terkait dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sementara dari segi kuantitasnya adalah terkait dengan jumlah Sumber daya Manusia itu sendiri apakah sudah mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan seluruh kelompok sasaran implementasi tersebut. sumber daya manusia sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan implementasi, jika Sumber daya manusia tersebut baik, implementasi kebijakan akan berjalan dengan cepat efektif serta efisien, sebaliknya jika kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia tersebut buruk, akan berpengaruh kepada lambatnya Implementasi kebijakan itu sendiri.

b. Anggaran (Budgetary)

Berkaitan dengan anggaran, Implementasi juga dipengaruhi oleh modal atau investasi yang juga termasuk kepada anggaran. Anggaran ini juga merupakan dukungan teknis yang urgen terhadap pelaksanaan implementasi.

c. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas juga merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan implementasi. fasilitas yang layak berbentuk fisik seperti; Gedung, tanah dan perlengkapan peralatan perkantoran secara layak akan menunjang sebuah kesuksesan implementasi suatu program ataupun kebijakan.

d. Informasi dan kewenangan (*Information and Authority*)

Ketersediaan informasi yang komprehensif juga dapat menunjang keberhasilan implementasi. hal ini terkait dengan informasi yang relevan dan penting yang dibutuhkan untuk implementasi suatu program kebijakan baik itu secara teknis, maupun konsep atau teoritis. Sementara urgensi kewenangan merupakan bagian yang penting karena akan terkait dengan Tindakan untuk meyakinkan dan menjamin kepada kelompok sasaran akan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Urgensi kecenderungan, perilaku yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan implementasi. salah satu Karakter penting yang harus dimiliki pelaksana implementasi adalah; kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur akan menjadikan pelaksana Implementasi (Implementor) akan tetap dalam tujuan program implementasi yang telah dirumuskan. Bersikap komitmen memiliki pengertian bahwa implementor akan bersikap antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Apabila sikap implementator baik maka dia akan dapat menjalankan implementasi tersebut dengan baik pula, dan begitu pula sebaliknya. Jika implementator bersikap tidak baik, maka proses perjalanan implementasi akan menemui kendala dan terhambat.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Aspek ini meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Dalam implementasi sebuah kebijakan atau program, disusunnya *Standart Operation Procedure* (SOP) merupakan salah satu aspek mekanisme. SOP merupakan panduan bagi Implementor untuk melaksanakan tindakannya agar tidak melenceng dari tujuan serta sasaran kebijakan. Kemudian struktur birokrasi yang menjadi aspek kedua merupakan salah satu hal yang penting. Jika Struktur birokrasi terlalu Panjang dan terfragmentasi akan mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan hingga menyebabkan kerumitan prosedur birokrasi hingga pada akhirnya aktifitas organisasi dalam Tindakan implementasi tersebut menjadi tidak fleksibel.

Dari narasi yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa ke-4 point tersebut merupakan hal yang penting harus menjadi sebuah persyaratan agar tercapainya implementasi suatu program kebijakans sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam narasi tersebut Sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki komunikasi yang efektif terhadap semua elemen pelaksana maupun pembuat program, serta didukung fasilitas yang memadai iklim birokrasi yang efektif serta efisien tentunya akan menjadikan suksesnya implementasi suatu program kebijakan tersebut.

## **2.2. Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan (Ansori, 2016). PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/ Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis (Ansori, 2016).

### **2.2.2. Dasar Hukum Secara Teknis**

Kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasarkan peraturan di bawah ini:

- a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b) Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
- c) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Presiden RI nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara rutin Non Tunai
- f) Lampiran Pepres no 63 Tahun 2017
- g) Peraturan Menteri Sosial RI nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

### 2.2.3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millinnium Development Goals (MDGs).

Tujuan khusus PKH yaitu:

- a. Meningkatkan taraf pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan nifas serta gizi anak balita
- c. Meningkatkan perolehan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

#### **2.2.4. Sasaran Penerima Bantuan PKH**

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/ nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak usia SD dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.

Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya RTSM pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin dan BLT (Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2013).

## **2.2.5. Kewajiban Peserta PKH**

### **2.2.5.1. Kewajiban Bidang Kesehatan**

Dalam bidang kesehatan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan menjadi penerima diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan. Adapun protocol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH meliputi:

1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali
2. Ibu hamil mendapatkan suplemen tablet Fe selama masa kehamilan
3. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
4. Ibu nifas memeriksakan diri sebanyak 3 kali
5. Anak usia 0-1 bulan mendapat pemeriksaan kesehatan sebanyak 3 kali
6. Anak usia 0-11 bulan ditimbang secara rutin setiap bulan dan mendapat vaksin lengkap sesuai tahapan usia
7. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus
8. Anak usia 1-5 tahun perlu ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

#### **2.2.5.2. Kewajiban Pendidikan**

Anak peserta PKH usia 7 – 18 tahun harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan baik SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/ MTs/ SMLB/ Salafiyah Wustha/ Paket B termasuk SMP/ MTs serta SMA/ MA/ Sederajat/ Paket C dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

#### **2.2.6. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini dikemudian hari

bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Skema bantuan PKH selama kurun waktu 2015-2018 disesuaikan dengan jumlah komponen keluarga penerima seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Skema Bantuan PKH Tahun 2020-2023

Komponen	Besaran Bantuan Tahunan (Dicairkan 4 tahap dlm setahun)
Bantuan Tetap PKH Reguler setiap Keluarga	Rp. 550.000,-
PKH Akses setiap keluarga	Rp. 1.000.000,-
Ibu Hamil/Balita	Rp. 2.400.000,-
Anak SD	Rp. 900.000,-
Anak SMP	Rp. 1.500.000,-
Anak SMA* (Bantuan Anak SMA mulai berlaku di tahap 4 tahun 2016)	Rp. 2.000.000,-
Penyanggah disabilitas berat	Rp. 2.400.000,-
Lansia 60 tahun keatas	Rp. 2.400.000,-

*Sumber: Pedoman Umum PKH, 2022*

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Nomor 2 Tahun 2017, tentang penetapan alokasi penerimaan bantuan nontunai sekaligus aturan besaran dana PKH, dinyatakan bahwa besaran penerimaan bantuan tersebut diberlakukan secara flat atau sama rata bagi setiap keluarga. Kebijakan dari Kemensos tersebut harus disosialisasikan oleh pendamping PKH di masing-masing wilayah. Pencairan dana PKH dilakukan secara bertahap dalam 4 kali tahapan dalam setahun. Namun pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk program keluarga harapan (PKH) pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin alias keluarga

penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun. Penerima bantuan di tahun 2019 tidak ada perubahan, tetap 10 juta KPM, tapi hanya saja ada perbedaan indeks bantuan di setiap keluarganya.

## **2.2.7. Kelembagaan PKH**

### **2.2.7.1. Kelembagaan Tingkat Pusat**

Kelembagaan di tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; Tim Pengarah Pusat terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari pejabat eselon II atau eselon III yang ditunjuk Tim Pengarah Pusat; dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH Pusat) yang merupakan pelaksana program dibawah kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

### **2.2.7.2. Kelembagaan Tingkat Daerah**

Kelembagaan di tingkat daerah terdiri dari Tim Koordinasi PKH Provinsi, Tim Koordinasi PKH Kabupaten/ Kota, dan PPKH Kabupaten/ Kota. Tim Koordinasi PKH Propinsi terdiri dari Gubernur sebagai pembina, Sekretaris Daerah ketua tim pengarah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi ketua tim teknis, kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai sekretaris, dan anggota meliputi kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, kepala

Badan Pusat Statistik (BPS), kepala kantor wilayah Agama, dan kepala instansi lain yang dianggap perlu.

Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum meliputi koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH, dan koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/ kota terkait pelaksanaan PKH. Tim Koordinasi PKH Kabupaten/ Kota meliputi Bupati atau Walikota sebagai Pembina, Sekertaris Daerah sebagai ketua tim pengarah, Bappeda sebagai ketua tim teknis, Kepala Dinas Sosial sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, BPS, Koordinator PPKH Kabupaten, Camat Lokasi PKH serta instansi lain yang dianggap perlu. Pelaksana PKH (PPKH) Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, serta tenaga Operator yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di sekretariat PPKH Kabupaten/ Kota. Sedangkan PPKH Kecamatan merupakan pelaksana PKH pada tingkatan terbawah pada pelaksana PKH. Keanggotaan PPKH Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala UPTD Pendidikan, Kepala UPTD Kesehatan, BPS, Pendamping PKH dan Kepala-kepala Desa.

### **2.2.8. Kegiatan PKH**

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH. Berdasarkan pedoman umum, kegiatan PKH meliputi sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran (targeting)
- b. Pertemuan awal dan validasi
- c. Pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- d. Penyaluran bantuan
- e. Verifikasi komitmen
- f. Pemutahiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan sosialisasi
- Rekrutmen dan pelatihan
- Rapat koordinasi tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/ kota
- Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia layanan (service provider)
- Pengaduan Masyarakat
- Monitoring dan evaluasi
- Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

### 2.3. Dasar Konseptual

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha – usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Kemiskinan mempunyai berbagai wujud, termasuk kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup seperti kelaparan, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.

Menurut Soetomo (2011) bahwa kondisi kemiskinan yang dialami suatu masyarakat seringkali telah berkembang dan bertali-temali dengan berbagai faktor lain yang membentuk jaringan kemiskinan yang dalam proses berikutnya dapat memperteguh kondisi kemiskinan itu sendiri. Faktor-faktor yang diidentifikasi membentuk jaringan atau perangkap kemiskinan tersebut adalah: kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Faktor kelemahan fisik dapat disebabkan karena kondisi kesehatan dan faktor gizi buruk, sehingga dapat mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah. Faktor isolasi terkait dengan lingkup jaringan ineteraksi sosial yang terbatas, serta akses terhadap informasi, peluang ekonomi dan fasilitas pelayanan yang terbatas pula. Faktor kerentanan terkait dengan tingkat kemampuan yang rendah dalam menghadapi kebutuhan dan persoalan mendadak. Faktor ketidakberdayaan terkait dengan akses dalam pengambilan keputusan, akses terhadap penguasaan sumber daya dan posisi tawar (bargaining position).

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa. Dimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkadang malah membuat hidup masyarakat makin terasa sulit dari segi ekonomi khususnya, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering terjadi ketika kelompok masyarakat hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, mereka menjadi termarginalkan, terpinggirkan, bahkan terabaikan.

Tanggungjawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu kementerian, sektor atau bidang tertentu sehingga pemerintah membuat kebijakan

dan program yang *pro poor*. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat tidak mampu/ miskin terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan, atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk keluarga miskin yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 4 : Penelitian terdahulu

No	Nama , Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Khodziah Isnaini Kholif (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, PUBLIK: <i>Jurnal Administrasi Publik (JAP)</i> , Volume II Nomor 4 Desember 2014	Kualitatif Variabel terkait fokus penelitian ini, yaitu Implementasi Program PKH di kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Adapun hasil penelitiannya menunjukkan implementasi Program PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil, karena tidak semua kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persamaan : Memiliki Penelitian terhadap Implementasi PKH  Perbedaan : Implementasi PKH di kelurahan Sidomulyo sesuai dengan Kebijakan Daerah
2	Aerif Sofianto,(2020) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Propinsi Jawa Tengah PUBLIK: <i>Jurnal Sosio Kosepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</i> , Volume 10 Nomor 1 Desember 2020	Mixed Method (Kualitatif dan Kuantitatif) Penelitian ini, mengambil 15 Kabupaten termiskin yang berada di Propinsi Jawa Tengah penglahan data dengan FGD,	Hasil yang ditemukan dari aspek manajerial dan prosedural di Propinsi Jawa tengah sudah dianggap baik, namun sasaran program kurang tepat dikarenakan data tidak valid, sebanyak 21,54 penerima PKH bukan tergolong miskin, hanya 13,99% yang miskin dan 26,21 % keluarga yang sangat miskin akurasi data kemiskinan dianggap perlu di tengah	Persamaan : Sasaran Program kurang tepat dikarenakan data tidak valid  Perbedaan : Menggunakan metode campuran dalam penelitian

		wawancara dengan menyebarkan kuisioner	covid 19 saat itu.	
3	Cahyo Sasmito,(2019), Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu, PUBLIK: <i>Journal of Public Sector Innovation</i> , Volume 3, Nomor 2, Mei 2020	menggunakan metode Deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Batu telah berjalan dengan baik. Komunikasi antara pendamping dan penerima PKH berjalan dengan baik dan lancar, serta dinas Sosial selalu melibatkan Pendamping dalam rapat kordinasi, seminar, matrikasi sebagai bekal untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pendamping	Persamaan : menggunakan metode kualitatif dengan melalui hasil wawancara dan observasi  Perbedaan: Lebih memfokuskan kinerja birokrat antar stakeholder
4	Yudid B.S. Tlonean, (2014), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, <i>JISIP, Vol 3, No 1, Tahun 2014</i>	Penelitian ini kualitatif dengan melakukan dokumentasi, wawancara dan data Lapangan yang berhasil dikumpulkan	Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Lowokwaru ditujukan kepada masyarakat miskin khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bantuan tersebut bersifat khusus, berupa data masyarakat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pendamping PKH di kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut: melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara	Persamaan : menggunakan konsep dan metode kualitatif

			berkala, melakukan pertemuan bulanan secara rutin dengan kelompok peserta PKH. Mengadakan pertemuan pengembangan program dengan penyedia layanan.	
5	Dyah Ayu Virgoreta, (2015) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban), <i>JAP, Vol.II No. 12</i> tahun 2015	Kualitatif Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan Sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan hal tersebut implementasi program keluarga harapan yang terdapat di desa Beji ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Diharapkan implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan	Persamaan : Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Perbedaan : Implementasi berdasarkan Kebijakan Daerah

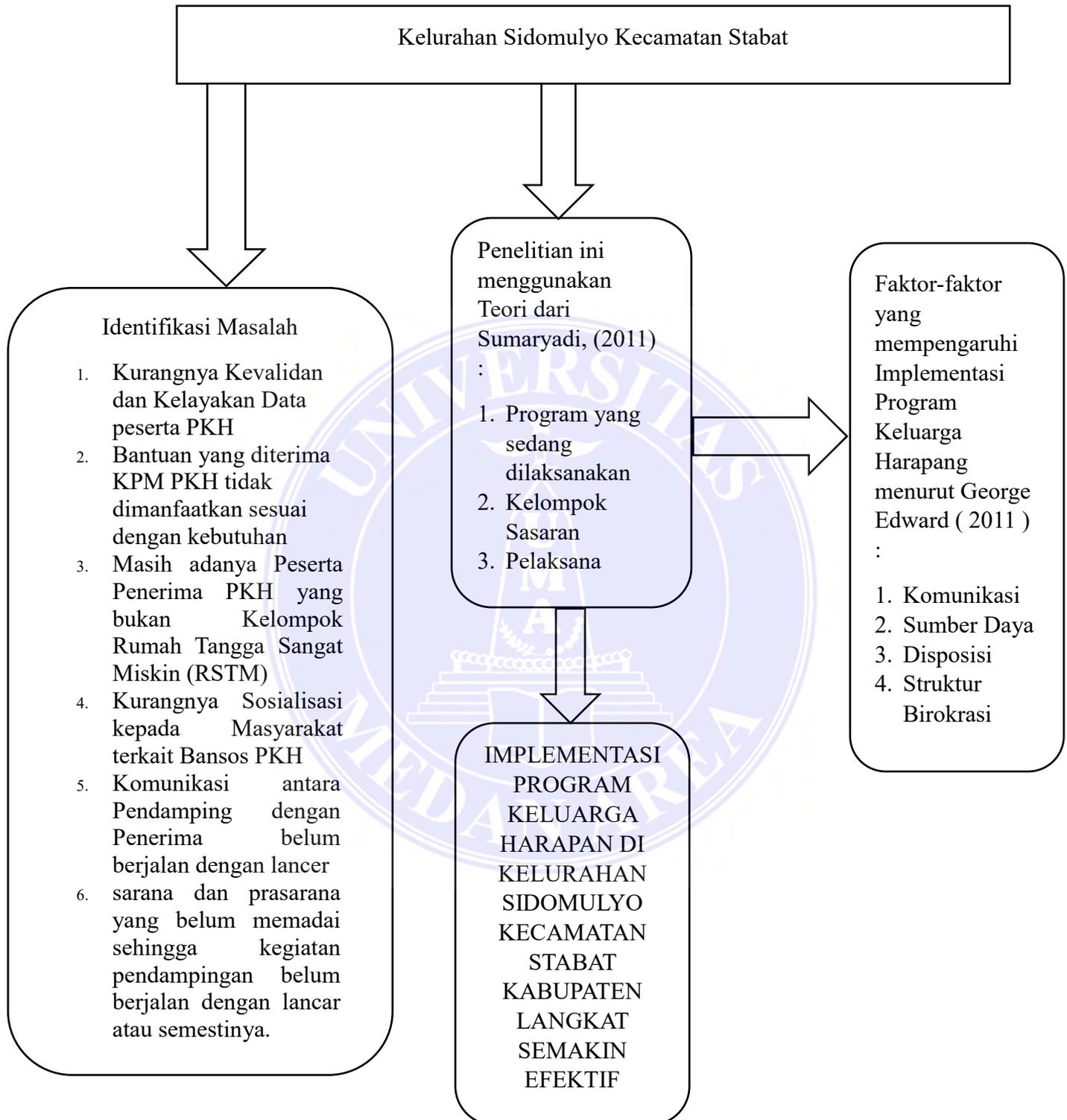
6	Winda Aulia Wardani,(2023), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 8 Nomor 4 November 2023	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PKH dan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKH. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi PKH di Desa Tenga telah terlaksana secara efektif, sesuai dengan tujuan dan pedoman pelaksanaan PKH. Dalam implementasi PKH terdapat proses sosialisasi dan pendistribusian dana PKH serta mencakup bidang-bidang kehidupan manusia, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Faktor pendukungnya yaitu, dana bantuan, masyarakat, komunikasi dan komitmen sedangkan faktor pengambatnya yaitu, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kinerja pendamping dan lokasi.	Persamaan : Menggunakan Metode yang sama yaitu Pendekatan Kualitatif Perbedaan : Lebih memfokuskan proses dan pendistribusian PKH
7	Slamet Agus Purwanto (2013), Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) <i>Wacana, Volume 16 Nomor 2 tahun 2013</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk	Persamaan : Memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi PKH Perbedaan : Implementasi Sidomulyo sesuai dengan kebijakan daerah

		deskriptif kualitatif .Teknik pengumpulan data melalui, wawancara kepada informan	membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan.	
8	Uswatun Chasanah (2021), Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru, <i>Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume II Nomor 5 Mei 2021</i>	Tujuan dari penelitian ini mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di kecamatan Gayungan Surabaya pada era adaptasi kebiasaan baru. Penelitian ini berdasarkan teori George C. Edward III sebagai tolak ukur implementasi Program Keluarga Harapan dikecamatan Gayungan. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Gayungan Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perbedaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya sebelum pandemic dan semasa Adaptasi Kebiasaan Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH berdasarkan teori George C. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan PKH sudah berhasil karena dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, lalu untuk implementasi PKH di Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terdapat beberapa perubahan dari komunikasi yang melakukan sosialisasi dengan via Zoom dan Koordinator kecamatan untuk mengurangi adanya kerumunan, namun hal ini dirasa kurang efektif dan efisien, sehingga Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) mengubah strategi dengan cara membagi zona.	Persamaan : Menggumakan teori george c edward sebagai tolak ukur  Perbedaan : Mengggunakan strategi pembagian zona dalam program PKH

## 2.5. Kerangka Pikir Penelitian

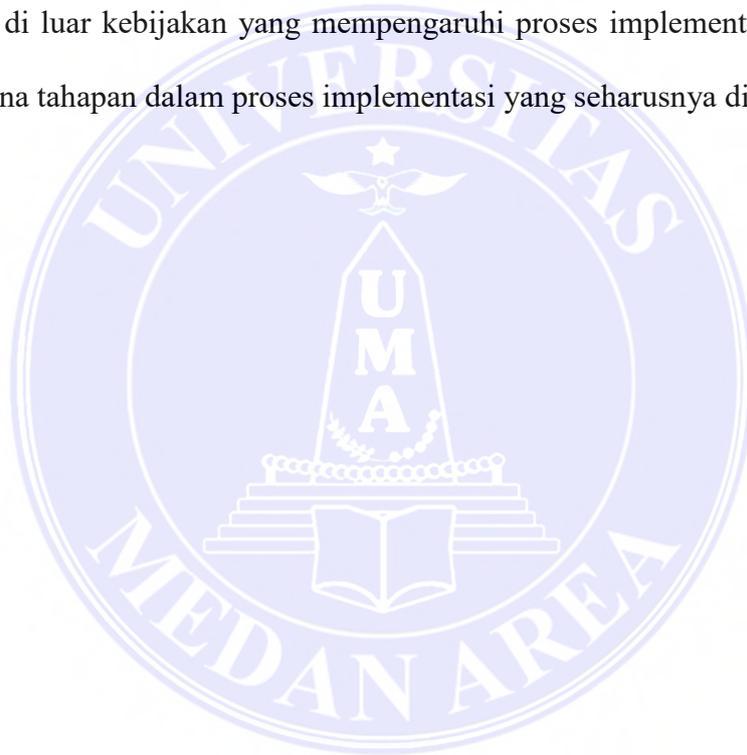
Misi program Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengupayakan perubahan perilaku dan pola pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin yang pada gilirannya dapat memutus mata rantai kemiskinan. Kebijakan dan misi yang baik ada kalanya tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang akan dicapai kadang justru memiskinkan masyarakat secara struktural, hal demikian dapat terjadi pada kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang dapat terungkap bahwa ada kecenderungan masyarakat miskin yang mendapat bantuan tunai untuk pendidikan anak justru dipergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini dikarenakan Program penanggulangan kemiskinan perlu penanganannya yang komprehensif terpadu, sinergi dan berkelanjutan, Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan masih rendahnya penghasilan masyarakat dan minimnya akses pelayanan kebutuhan dasar, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat kerangka pemikiran dari penelitian ini seperti gambar dibawah ini :

**Gambar—Kerangka Pikir Penelitian**



**Gambar 2. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan gambar diatas dapat dinyatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat akan diukur dengan unsur-unsur implementasi yang dirumuskan oleh Sumaryadi (2011), dengan mempertimbangkan mudah tidaknya masalah yang dikendalikan yaitu program yang sedang dilaksanakan, keragaman perilaku kelompok sasaran dan tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, Kemudian kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Selanjutnya bagaimana tahapan dalam proses implementasi yang seharusnya dilakukan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriah (2012) penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dengan menguji hipotesis. Sejalan dengan pendapat tersebut Moleong (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Jadi penelitian ini berupaya melakukan deskriptif terhadap implementasi PKH di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan pendekatan kualitatif.

#### **3.1 Tempat dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatra Utara. Adapun alasan peneliti untuk memilih lokasi ini adalah

1. Kelurahan Sidomulyo merupakan salah satu kelurahan yang memiliki masalah dalam penerimaan PKH di Kecamatan Stabat.

2. Adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidomulyo.
3. Melihat adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH.

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dilakukan secara terjadwal, dengan skema perencanaan jadwalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Pedoman Penulisan Tesis

No	KET	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	MAR	APR
1	Pengajuan Judul Tesis	♥							
2	Bimbingan Penulisan Bab I-III		♥						
3	Seminar			♥					
4	Penelitian				♥				
5	Konsultasi					♥			
6	Seminar Hasil						♥		
7	Sidang Tesis							♥	
8	Revisi Akhir								♥

(Sumber : Diolah dari buku Pedoman Penulisan Tesis 2022)

Tabel diatas masih bersifat tentative, bisa berubah-ubah dan dapat disesuaikan dengan kondisi dilapangan nantinya.

### 3.2 Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Menurut Suyanto (2013), subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus ini penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Suyanto (2013) mengemukakan bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan  
Yaitu biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan jenis data penelitian yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci (key informan) yaitu Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat : Bpk. Soegiono
2. Informan Utama, yaitu Pendamping PKH: Ibu Yera Khairida
3. Informan Tambahan, yaitu: Masyarakat penerima PKH di Kelurahan Sidomulyo sebanyak 5 orang

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya meneliti itu adalah ingin mendapatkan data yang valid, realibel dan objektif tentang gejala tertentu. Maka diperlukanlah teknik pengumpulan data yang tepat. Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Senada dengan pernyataan tersebut Noor (2013) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Berdasarkan defenisi di atas, maka teknik wawancara yang dilakukan peneliti

dalam penelitian implementasi PKH di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program PKH tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal awal mengenai masalah maupun hal-hal yang lebih mendalam tentang implemetasi PKH.

## 2. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan tanpa ada pertolongan lain untuk keperluan tersebut. Selain observasi langsung peneliti melakukan observasi tidak langsung dengan melihat fenomena yang berkembang melalui dokumen-dokumen kegiatan atau berita yang berkembang di media masa. Pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai kriteria (Sugiyono, 2013), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, artinya peneliti melakukan pengamatan ke lokasi pelaksanaan implementasi program PKH dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu di lokasi yang menjadi sasaran program PKH di Kelurahan Sidomulyo.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, artinya pengamatan dilakukan oleh peneliti mengacu pada desain penelitian yang telah dibuat sebelum terjun melakukan pengamatan di lokasi penelitian pada implementasi program PKH di Kelurahan Sidomulyo.

- c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja, artinya peneliti dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan melakukan analisa data dengan melakukan validasi data yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan dari fenomena yang terjadi dalam implementasi PKH di Kelurahan Sidomulyo.
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasinya, artinya hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengamati implementasi PKH di Kelurahan Sidomulyo dilakukan kroscek kebenarannya dan dilakukan pengontrolan atas kebenaran data tersebut kemudian diperbandingkan dengan data yang didapat baik dari wawancara maupun dokumentasi sehingga dalam menganalisa peneliti menyimpulkannya dengan tepat.

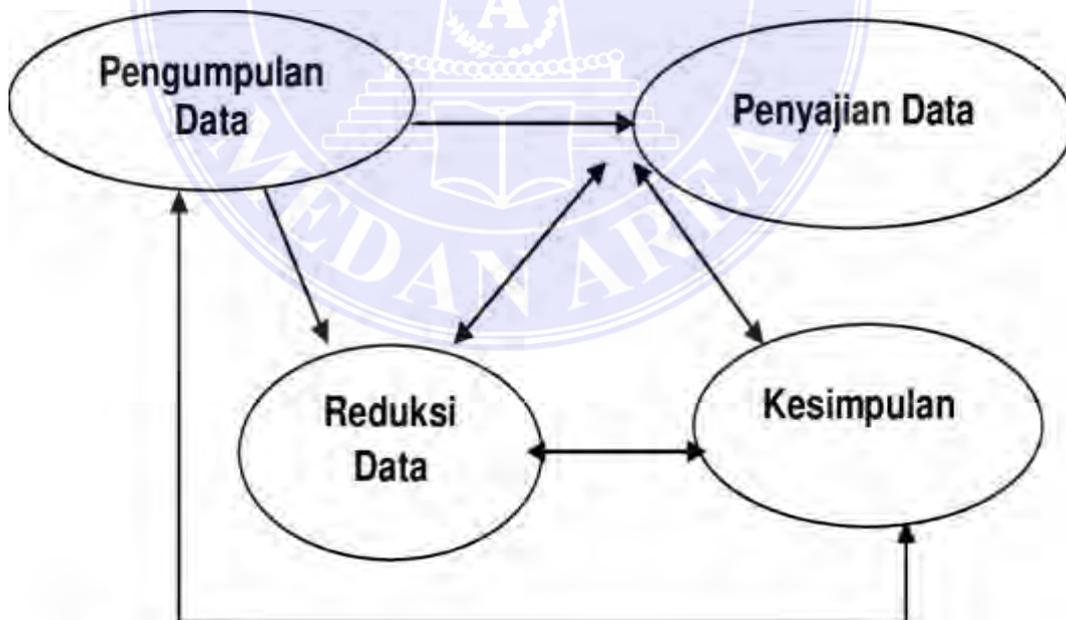
### 3. Studi Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan yang didapatkan dari dokumen pendamping PKH di Sidomulyo maupun dari dokumentasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian dokumen gambar didapatkan dari para pendamping PKH di Kelurahan Sidomulyo maupun gambar yang didapatkan dari jepletan peneliti sendiri, atau karya-karya monumental dari para jurnalis media ataupun pelaksana PKH di tingkat koordinator RTSM di tingkat RT dan RW.

### 3.4 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Adapun analisis data menurut Sugiyono (2013) terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknis analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tersebut. Berikut ini model analisis interaktif, seperti pada Gambar dibawah ini:



Gambar 3. Analisis Data Model Interaksi

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013 : 246)

### 1. Pengumpulan Data

Setelah arah penelitian dan sumber data diketahui, dilakukan pengumpulan data untuk mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Masalah yang dipelajari harus tercermin dalam data yang dikumpulkan. Survei, kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah contoh strategi atau metode pengumpulan data yang mempermudah pengumpulan data.

### 2. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut

kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan teknik dan analisa data, dimulai dengan mengumpulkan data-data tentang implementasi kebijakan program, PKH di Kelurahan Sidomulyo, baik dari data observasi, data wawancara, data literatur, dan data dokumentasi. Setelah itu dilakukan pengumpulan data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Kemudian, data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya seusai kajian yang diteliti mengenai implementasi program PKH di Kelurahan Sidomulyo (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan membuat tabel matrik pengelompokan data).

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Kemudian data dipilah dan disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir

untuk mempermudah penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Setelah reduksi data, berikutnya dilakukan penyajian data (display data). Data yang sudah direduksi di atas lalu data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Berikutnya, setelah data disajikan dilakukan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Ketiga komponen analisa data di atas terus berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Ketika kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan di lokasi penelitian PKH di Kelurahan Sidomulyo dilakukan. Setelah itu, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ke tiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Sidomulyo selesai dilakukan peneliti dengan tepat dan berhasil.

### **3.5 Prosedur Penelitian**

Penelitian kualitatif biasanya didesain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Hal itu dapat terjadi bila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan. Meski demikian, kerja penelitian mestilah

merancang langkah-langkah kegiatan penelitian. Paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif yaitu (Sugiyono, 2013) yaitu :

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi.

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya

2. Tahap reduksi.

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi.

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.

Secara spesifik, ketiga tahap di atas dapat dijabarkan dalam beberapa langkah penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pelaporan hasil penelitian (Sudjana, 2011).

Dalam penelitian ini Peneliti akan melakukan langkah pertama: mengidentifikasi masalah, kemudian membuat pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan langkah ketiga yaitu: penetapan fokus penelitian. Langkah keempat:

yang dilakukan peneliti yakni pengumpulan data dan selanjutnya adalah pengolahan dan pemaknaan data. Sebagai langkah terakhir peneliti akan melakukan pelaporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melakukan kegiatan pengumpulan data penelitian dinyatakan selesai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

##### **5.1.1. Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun penulis dapat disimpulkan bahwa Pelaksana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat memiliki kinerja yang efektif dan efisien. Hal tersebut dibuktikan dari kinerja mereka dalam menjalankan program dilakukan dengan baik. Namun memiliki beberapa kendala teknis terkait pengusulan data PKH serta komunikasi yang kurang maksimal antara kelurahan dan pendamping serta KPM PKH kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat tentunya hal tersebut merupakan penghambat dari Implementasi Program PKH yang dilaksanakan di kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat.

Selain itu kurangnya pengetahuan KPM PKH tentang Program Bantuan Sosial dan juga kurangnya kesadaran dari mereka terhadap pentingnya mengubah Tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.

##### **5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupten Langkat**

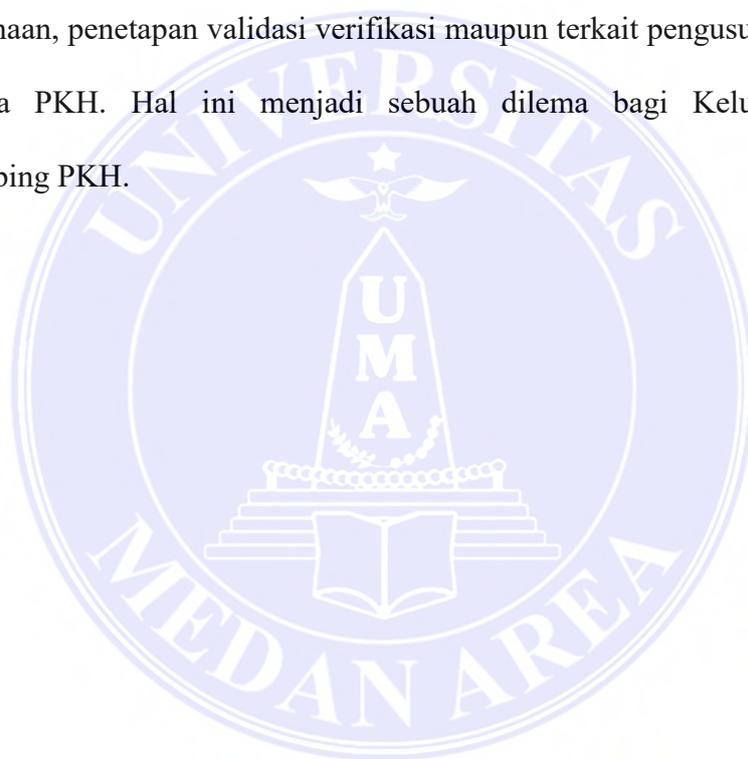
Ditemukan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat. menurut teori Edward Faktor-faktor itu antara lain: Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Beberapa faktor yang disebutkan Edward menurut penelitian penulis dapat dikategorikan berlangsung dengan baik, namun secara teknis ditemukan kendala-kendala kecil yang dapat diselesaikan oleh Pelaksana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo itu sendiri. Adapun kendala kecil itu antara lain, komitmen kepesertaan PKH terhadap kewajibannya dalam menggunakan bantuan PKH dan ketidaksesuaian data penerima PKH dengan Kondisi di lapangan serta keterbatasan fasilitas dan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan PKH kurang maksimal.

## 5.2. SARAN

Adapun saran yang akan disampaikan oleh peneliti terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat adalah perlunya melakukan komunikasi berupa koordinasi yang baik kepada pihak terkait antara pihak kelurahan dan Pendamping PKH serta Keluarga Penerima manfaat PKH. Selain itu, perlunya melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH terkait informasi-informasi mengenai Program Keluarga Harapan, salah satunya mengingatkan kepada KPM PKH untuk selalu melakukan update data kependudukan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian memberikan edukasi kepada KPM PKH terkait dengan perubahan tingkah laku mereka menuju perbaikan Tingkat kesejahteraan mereka sendiri.

Adapun saran yang akan penulis sampaikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat yaitu diharapkan agar Pendamping PKH mendapatkan pelatihan peningkatan Kapasitas agar kinerja lebih efisien, efektif seriat meningkatkan kualitas pekerjaan menjadi lebih baik. Selain itu penulis juga menyarankan kepada stekholder pemegang kebijakan untuk selalu mengadakan kroscek ulang terkait program Keluarga Harapan baik itu dalam proses perencanaan, penetapan validasi verifikasi maupun terkait pengusulan data terbaru penerima PKH. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi Kelurahan maupun pendamping PKH.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Edward III, George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington Congressional Quarterly Press
- Abdul Wahab, Solichin (2012). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jeffrey L Pressman and Aaron B Wildavsky, 1973. *Implentation*. University of California Press
- Subandijah. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Mazmanian, Daniel. 2000. *Theories of Public Organization*. USA: Harcourt Brace Collage Publishers.
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *Teori Implementasi Kebijakan Publik*
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, Djauhari. 2013. *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soetomo. 2011. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

### JURNAL

- Khodziah Isnaini Kholif (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, PUBLIK: *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume II Nomor 4 Desember 2014

- Aerif Sofianto,(2020) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Propinsi Jawa Tengah PUBLIK: *Jurnal Sosio Kosepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 10 Nomor 1 Desember 2020
- Cahyo Sasmito,(2019), Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu, PUBLIK: *Journal of Public Sector Innovation*, Volume 3, Nomor 2, Mei 2020
- Yudid B.S. Tlonean, (2014), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, *JISIP, Vol 3, No 1, Tahun 2014*
- Dyah Ayu Virgoreta, (2015) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban),*JAP, Vol.II No. 12 tahun 2015*
- Winda Aulia Wardani,(2023), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 8 Nomor 4 November 2023*
- Slamet Agus Purwanto (2013), Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) *Wacana, Volume 16 Nomor 2 tahun 2013*
- Uswatun Chasanah (2021), Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume II Nomor 5 Mei 2021*

### Wawancara Bersama Lurah Kelurahan Sidomulyo An. Soegiono, S.pd



### Wawancara Bersama kasi Kelurahan Sidomulyo An. Siti Salwa



## Wawancara Bersama Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)



Bersama ibu Reni Oslianti sebagai KPM PKH (gbr yg di atas)



Bersama ibu Hariani sebagai KPM PKH (gbr yg di atas)

Bersama ibu Minarseh sebagai KPM PKH



Wawancara bersama ibu Ria Dewi sebagai KPM PKH



Wawancara Bersama ibu Ramadhani sebagai KPM PKH



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;

**turnitin** Similarity Report ID: afd29477-52728795

PAPER NAME  
**Tesis Cici Indah Sari.docx**

---

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
<b>17232 Words</b>	<b>114346 Characters</b>
PAGE COUNT	FILE SIZE
<b>72 Pages</b>	<b>872.9KB</b>
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
<b>Feb 23, 2024 12:35 AM GMT+7</b>	<b>Feb 23, 2024 12:57 AM GMT+7</b>

**25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database:

- 23% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

### PASCASARJANA

*Program Magister Ilmu Administrasi Publik – Agribisnis - Ilmu Hukum – Psikologi -  
Manajemen - Program Doktor : Ilmu Pertanian*

Jl. Setia Budi No. 79-B Tj. Rujak Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia  
Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

---

Nomor : 161/PPS-UMA/WDI/01/XI/2023 24 Nopember 2023  
Lampiran :  
Hal : *Surat Ijin Penelitian MAP*

**Yth. Lurah Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama	<b>Cici Indah Sari</b>
NPM	<b>221801014</b>
Program Studi	<b>Ilmu Administrasi Publik</b>
Judul Tesis	<b>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat</b>

Untuk melaksanakan pengambilan data di **Kantor Lurah Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat** sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Pascasarjana  
Bid. Penjamin Mutu Akademik  
**Hoby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP**

CC: File

---

Kampus Utama - Jalan Kualanaram No. 1 Medan Estate/Telp. (061) 7166878 Fax. (061) 7166998 Medan 20223



## LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

No. 09.01/FCG-FJSS/II/2024

This is to certify that,

Name : Cici Indah Sari, Budi Hartono, Maksom Syahri Lubis

Manuscript Title : Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sidomulyo Village, Stabat District Langkat Regency

Have successfully accepted for publication Vol.3, No.1 March 2024. The manuscript has passed the editor screening and peer review process. The article will be available online in March 2024. If you require more information regarding the publication, please feel free to send me an email at [jenpenghuang25@gmail.com](mailto:jenpenghuang25@gmail.com). Thank you very much.

Faithfully yours,  
Medan, 27 February 2024



*Jen-peng Huang*

Prof. Jen-peng Huang, Ph.D  
Editor in Chief  
Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)  
Office: Jl. Ir. H. Juanda No.56B, Lantai 2, Medan, Indonesia  
Whatsapp: +62 877 1338 1007



Scan this QR Code  
to check the  
originality of this  
LOA

Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) has been widely indexed by:



Other Libraries



